



**TRANSPARANSI PENDATAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL
TUNAI DALAM PENANGULANGAN KEMISKINAN DI
LINGKUNGAN DESA TAMAN SARI KECAMATAN GUNUNG
SARI LOMBOK BARAT**

Amelia Cantika Febriyanti¹, Inka Nusamuda Pratama²

^{1,2}Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

¹Correspondence Email: ameliacantika2002@gmail.com

Received: 10 Januari 2025

Accepted: 25 March 2025

Published: 30 March 2025

Abstract

Transparansi dalam program Bantuan Sosial Tunai (BLT) di Desa Taman Sari, Kecamatan Gunung Sari, menjadi isu penting yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Ketidaktepatan sasaran dan minimnya mekanisme pengawasan memperburuk situasi ini, memungkinkan terjadinya penyelewengan data dan subjektivitas dalam proses verifikasi calon penerima manfaat. Kurangnya komunikasi terkait perubahan data penerima menyebabkan adanya penerima ganda atau penerima yang terlewatkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi Program BST dan untuk mengetahui pemberian BST secara Transparan di Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari. Hasil dari penelitian ini adalah, Pelaksanaan program BST di Desa Taman Sari menunjukkan pencapaian yang positif dalam hal transparansi dan partisipasi masyarakat. Pemerintah desa telah berhasil memastikan bahwa informasi mengenai penggunaan anggaran dan distribusi bantuan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. Pemanfaatan teknologi informasi turut memperlancar distribusi informasi tentang program BST kepada masyarakat. Program BST di Desa Taman Sari telah dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Keywords: *Transparansi, Bantuan Sosial Tunai, Kemiskinan*

A. Pendahuluan

Secara umum Masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Hal ini bukan saja karena persoalan kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir ditengah-tengah kita, namun gejalanya semakin meningkat seiring dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kemiskinan merupakan karakteristik yang melekat pada individu, namun bukan berarti bahwa hal tersebut semata-mata menjadi tanggung jawab individu tersebut. Harus menjadi perhatian setiap bagian atau kelompok kepentingan di negara ini untuk mengatasi masalah besar ini (Sofi, 2021)

Negara berkewajiban menjamin kesejahteraan setiap warga negara dan setiap warga negara berhak atas kesejahteraan. Kesejahteraan penduduk memiliki pengaruh besar pada sistem politik, ekonomi, dll. Kesejahteraan penduduk suatu negara menunjukkan seberapa sukses suatu negara dalam mencapai tujuannya. Untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, pemerintah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Namun, terkadang program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak berjalan efektif. Hal ini disebabkan ketidak tepatan target karena identifikasi target yang tidak tepat. Sering terjadi kesalahan dalam menentukan kelayakan. Tentu saja, hal-hal seperti ketidak jelasan tujuan penerimaan bantuan harus dibenahi dan dicarikan solusinya agar tidak terulang lagi dalam program-program bantuan di masa mendatang. (Purnawan et al., 2022)

Di tingkat daerah, kondisi kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencerminkan situasi yang lebih memprihatinkan dibandingkan rata-rata nasional. Pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin di NTB mencapai 14,56% dari total populasi, atau sekitar 730 ribu orang. Angka ini menempatkan NTB sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di Indonesia. Beragam faktor lokal seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya tingkat pendidikan, serta akses terbatas terhadap lapangan kerja berkontribusi pada tingginya angka kemiskinan di wilayah ini.

Kondisi ini menegaskan perlunya strategi khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal untuk mengatasi kemiskinan,

khususnya di NTB. Program-program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal, seperti pelatihan keterampilan kerja, dukungan bagi usaha kecil dan menengah (UKM), serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, perlu menjadi prioritas utama. Selain itu, optimalisasi program bantuan sosial seperti Bantuan Sosial Tunai (BST) sangat penting untuk membantu masyarakat yang paling rentan. Namun, program ini harus dilaksanakan dengan transparansi dan akurasi dalam pendataan, sehingga benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan.

Pemerintah sudah berupaya untuk mencapai tujuan menyejahterakan masyarakat melalui program-program pengentasan kemiskinan, seperti Bantuan Sosial Tunai (BST) oleh Kementerian Sosial, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri oleh Pemerintah Pusat atau Daerah, sementara di daerah ada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) oleh Pemerintah Daerah, Program Keluarga Harapan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan lain-lain. Program-program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan terkesan belum terintegrasi satu sama lain karena masing-masing program dilakukan oleh kementerian atau instansi yang berbeda untuk tujuan yang sama (Purnawan et al., 2022).

Hadirnya covid-19 telah merubah perekonomian dunia, termasuk perekonomian indonesia yang ditunjukkan adanya pengalihan anggaran untuk menangani perekonomian yang ada di indonesia dalam menghadapi dampak yang terjadi akibat dari covid-19 ini, banyak sekali masyarakat yang kehilangan pekerjaan mereka, kehilangan pemasukan keuangan mereka di karenakan pembatasan aktivitas yang dilakukan untuk mengurangi angka masyarakat yang terkena virus ini dan dampak terparah dari covid-19 ini ialah kematian, sehingga berbagai skema bantuan pemerintah lontarkan demi membantu warga masyarakat yang terdampak covid-19 (Iping, 2020).

Program penanggulangan kemiskinan lingkungan Taman Sari sebelum Covid-19 adalah program JPS, PKH, BANSOS dan Sembako. Masalah Kemiskinan di lingkungan Taman Sari merupakan masalah yang tidak mudah diatasi karena kompleksnya faktor penyebab kemiskinan. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian tentang "*transparansi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari*". Penyaluran bantuan sosial Covid - 19 dilakukan dengan mekanisme, yaitu antara lain menentukan sasaran tujuan dari program penyaluran bantuan sosial, melakukan sosialisasi terkait penyaluran bantuan sosial

kepada masyarakat melalui pertemuan dengan Dinas Sosial, Lurah/Kades, Ketua RW/RT yang kemudian informasi terkait bansos dapat disampaikan kepada masyarakat, melakukan pendataan terkait penerima bantuan sosial di setiap RT, setelah data terkumpul dan di selektifkan, kemudian Ketua RT menyampaikan data atau perubahan data calon penerima bansos kepada Lurah/Kades.

Transparansi dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT) masih menjadi isu kritis yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan tersebut, termasuk di lokasi penelitian, yaitu Desa Taman Sari, Kecamatan Gunung Sari. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat berbagai tantangan dalam pendataan dan penyaluran BLT yang menunjukkan kurangnya keterbukaan informasi di berbagai tahapan pelaksanaan. Ketidakjelasan kriteria penerima bantuan sering kali memicu ketidakpuasan masyarakat, terutama ketika mereka merasa bahwa bantuan tidak diberikan secara adil atau tidak tepat sasaran. Hal ini diperburuk oleh minimnya mekanisme pengawasan yang efektif, sehingga memungkinkan terjadinya penyelewengan data atau pengaruh subjektivitas dalam proses verifikasi calon penerima manfaat.

Dengan analisis ini, jelas bahwa perbaikan pada aspek transparansi menjadi hal yang mendesak. Pemerintah desa dan pihak terkait perlu mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dalam mendata dan menyalurkan bantuan, seperti memanfaatkan teknologi digital untuk memastikan akurasi data serta melibatkan masyarakat dalam proses pemantauan. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi program, tetapi juga memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penulis berupaya untuk menganalisis mengenai transparansi pelaksanaan bantuan sosial tunai di desa taman sari kecamatan gunung sari.

B. Metode Penelitian

Rancangan penelitian merupakan sesuatu yang sangat esensial atau penting sebelum melakukan penelitian. Pendekatan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif di gunakan dengan alasan lebih mudah disesuaikan apabila dihadapkan pada kenyataan lapangan yang berbeda karena pendekatan kualitatif bersifat dinamis(Nurahmawati & Hartini, 2020).Penelitian kualitatif menawarkan beberapa jalan bagi permasalahan yang peneliti bawa ke dalam penelitian, yaitu: 1). Masalah yang diajukan peneliti

diperbaiki menjadi sama dari awal hingga akhir penelitian, sehingga judul proposal sama dengan judul hasil penelitian. 2). Masalah yang diperkenalkan oleh peneliti setelah transisi ke penelitian memperluas atau memperdalam masalah yang telah disiapkan, sehingga tidak terlalu banyak perubahan, sehingga nama penelitian cukup disempurnakan. 3) Masalah yang diajukan peneliti setelah masuk ke lapangan sudah berubah total, sehingga masalah harus diganti, sehingga judul proposal tidak sesuai dengan nama penelitian dan judul harus diubah.

Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang tepat dalam mendeskripsikan hasil penelitian ini. Karena penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan serta menekankan makna generalisasi, maka pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. (Paat et al., 2021)

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari selama 2 bulan September dan Oktober 2024

Teknik Penentuan Informan/Narasumber

Teknik penentuan informan (narasumber) dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dimana Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling yaitu teknik pengambilan informan yang didasarkan atas tujuan. Informan / narasumber yang dipilih dalam penelitian ini merupakan informan yang memiliki latar belakang pengetahuan tentang yang diteliti (Sofi, 2021). Adapun informan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kelurahan, Kepala Lingkungan, Ketua RT, dan masyarakat penerima Bantuan Sosial Tunai di wilayah Desa Taman Sari.

Sumber Data

Sumber data ialah subyek darimana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian yaitu data primer dan sekunder.

Teknik dalam melakukan pengumpulan data adalah langkah yang efektif dan strategis terutama dalam melakukan penelitian, hal tersebut dikarenakan tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh dan mendapatkan suatu data (Purnawan et al., 2022).

Sumber: (Purnawan et al., 2022).

Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode untuk memperoleh informasi agar mempermudah penelitian

yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi.

C. Hasil dan Pembahasan

Profil Desa Taman Sari Kabupaten Lombok Barat

Desa Taman Sari merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa ini dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi alam yang cukup melimpah, dengan pemandangan alam yang indah dan tanah yang subur, memungkinkan untuk berkembangnya sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduknya. Selain itu, Desa Taman Sari juga dikenal dengan keberagaman budaya dan tradisi lokal yang menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat setempat.

Transparansi Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai di Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari

Transparansi merupakan prinsip utama dalam pelaksanaan program bantuan sosial tunai (BST) untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas dalam penanggulangan kemiskinan. Transparansi ini mencakup penyampaian informasi yang jelas terkait mekanisme pendataan penerima manfaat, kriteria kelayakan, hingga proses penyaluran bantuan. Dalam konteks pendataan, pemerintah atau pihak yang bertanggung jawab wajib melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat lokal, untuk meminimalkan potensi kesalahan atau manipulasi data. Selain itu, penggunaan teknologi digital dalam proses pendataan dapat meningkatkan keterbukaan, seperti dengan menyediakan akses informasi berbasis daring yang memungkinkan masyarakat memverifikasi data penerima manfaat secara mandiri.

Transparansi dalam pelaksanaan BST memerlukan pelaporan yang terbuka dan berkala kepada publik. Laporan ini meliputi jumlah anggaran yang telah disalurkan, jumlah penerima manfaat, dan hasil evaluasi pelaksanaan program. Dengan adanya pelaporan yang komprehensif, masyarakat dapat memahami bagaimana program tersebut dijalankan dan mengevaluasi keberhasilannya dalam menanggulangi kemiskinan. Transparansi yang diiringi akuntabilitas dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat akan memperkuat efektivitas program bantuan sosial tunai sebagai salah satu strategi untuk mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

Bantuan sosial tunai (BST) memberikan berbagai keuntungan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pertama, dari segi efektivitas penyaluran, BST memungkinkan dana bantuan langsung diterima oleh masyarakat miskin tanpa melalui banyak perantara, sehingga meminimalkan potensi penyelewengan atau keterlambatan distribusi. Kedua, bantuan ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat miskin dengan memberikan mereka akses langsung terhadap sumber daya keuangan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, kesehatan, atau pendidikan. Ketiga, fleksibilitas penggunaan menjadi salah satu keunggulan BST karena penerima dapat menyesuaikan pemanfaatan dana sesuai prioritas kebutuhan mereka. Terakhir, BST sering kali dikaitkan dengan upaya meningkatkan inklusi keuangan, misalnya melalui pembukaan rekening bank atau dompet digital bagi penerima manfaat, yang secara tidak langsung mendukung literasi dan akses ke layanan keuangan formal.

Terdapat wawancara antara penulis dengan pihak kepala desa yang secara garis besar hasilnya, transparansi dalam pendataan penerima manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST) menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program di wilayahnya. Proses pendataan dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah desa (musdes) yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk perangkat desa, tokoh masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan. Data awal diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang kemudian diverifikasi dan divalidasi melalui survei lapangan untuk memastikan akurasi data. Pendekatan ini bertujuan meminimalkan potensi kesalahan atau manipulasi data, sehingga penerima manfaat yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan kriteria kelayakan yang ditentukan.

Transparansi juga diwujudkan melalui penyebaran informasi yang terbuka terkait kriteria penerima manfaat dan mekanisme penyaluran bantuan. Kepala desa memastikan bahwa informasi tersebut disampaikan secara luas kepada masyarakat melalui papan informasi desa dan media sosial resmi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program, sekaligus mendorong keterlibatan aktif mereka dalam mengawasi pelaksanaannya. Dengan pendekatan yang transparan dan partisipatif ini, pelaksanaan program BST di Desa Taman Sari diharapkan dapat berjalan secara akuntabel, tepat sasaran, dan efektif dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah tersebut.

Ketersediaan Dan Aksesibilitas Dokumen Anggaran

Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen anggaran merupakan aspek penting dalam mendukung transparansi pendataan dan pelaksanaan

Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Taman Sari. Kepala Desa Taman Sari memastikan bahwa seluruh dokumen anggaran terkait program BST tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat melalui mekanisme resmi. Dokumen ini mencakup alokasi anggaran, rincian dana yang diterima desa, serta distribusi bantuan kepada penerima manfaat. Transparansi ini bertujuan untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Dokumen anggaran disimpan dan dikelola secara sistematis, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Di Desa Taman Sari, perangkat desa bertanggung jawab untuk memastikan dokumen-dokumen tersebut tersusun rapi sehingga mudah ditemukan dan ditinjau bila diperlukan. Selain itu, perangkat desa juga mengintegrasikan penggunaan teknologi, seperti aplikasi berbasis daring, untuk memudahkan pengarsipan dan memaksimalkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat yang melek digital. Langkah ini mempercepat proses verifikasi data serta mempermudah pengawasan oleh pihak terkait (Pratama, Iman, et al., 2025).

Aksesibilitas dokumen anggaran juga ditingkatkan dengan penyediaan saluran informasi yang terbuka, seperti papan informasi desa, forum musyawarah desa, dan media sosial resmi desa. Kepala desa secara rutin mengumumkan rincian program dan laporan penggunaan anggaran pada forum musyawarah desa untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Dengan adanya penyebaran informasi melalui berbagai saluran, masyarakat dapat lebih mudah mengetahui dan memantau penggunaan anggaran program BST secara langsung.

Dalam memastikan ketersediaan dan aksesibilitas dokumen anggaran tetap ada. Salah satu kendala yang dihadapi adalah tingkat literasi keuangan masyarakat yang belum merata. Sebagian masyarakat mungkin kurang memahami isi dan terminologi dalam dokumen anggaran, sehingga kesadaran mereka terhadap transparansi program masih terbatas. Untuk mengatasi kendala ini, pihak desa telah menginisiasi sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya pengawasan anggaran agar masyarakat lebih memahami mekanisme pelaporan dan pengelolaan dana BST.

Secara keseluruhan, ketersediaan dan aksesibilitas dokumen anggaran dalam pelaksanaan BST di Desa Taman Sari menjadi langkah strategis untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas program.

Dengan pengelolaan dokumen yang sistematis, saluran informasi yang terbuka, serta edukasi kepada masyarakat, diharapkan program ini dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak yang signifikan

dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah tersebut. Hal ini juga mencerminkan komitmen pemerintah desa terhadap tata kelola yang baik dan transparan.

Kebijakan Desa Taman Sari Dalam Menginformasikan Program Bantuan Sosial Tunai

Desa Taman Sari telah mengadopsi kebijakan yang berfokus pada transparansi dan keterbukaan informasi dalam pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai (BST). Pemerintah desa berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap informasi terkait program BST, mulai dari pendataan hingga distribusi bantuan, dapat diakses oleh masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah desa sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan program.

Salah satu langkah yang diambil adalah penyebaran informasi melalui berbagai saluran komunikasi. Pemerintah desa menggunakan papan informasi yang ditempatkan di kantor desa untuk mempublikasikan data penerima manfaat, mekanisme penyaluran bantuan, dan laporan anggaran. Selain itu, media sosial resmi desa, seperti WhatsApp dan Facebook, dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi secara cepat dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Dengan pendekatan ini, pemerintah desa dapat mengatasi hambatan geografis dan memberikan akses informasi yang lebih inklusif.

Kebijakan lainnya adalah pelaksanaan musyawarah desa (musdes) secara rutin. Dalam forum ini, pemerintah desa memberikan penjelasan terkait kriteria penerima manfaat, proses pendataan, dan mekanisme penyaluran bantuan. Musdes juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk memberikan masukan, menyampaikan keluhan, atau mengajukan klarifikasi terkait program BST. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, musdes meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan, bahwa Desa Taman Sari telah mengimplementasikan kebijakan yang efektif dalam menyebarkan informasi terkait program Bantuan Sosial Tunai (BST). Pemerintah desa memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, termasuk papan informasi desa dan media sosial resmi seperti WhatsApp dan Facebook, untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, baik yang berada di pusat desa maupun yang lebih terpencil, mendapatkan informasi yang sama secara cepat dan efisien. Penggunaan media sosial terbukti sangat membantu menjangkau masyarakat yang kesulitan untuk datang langsung ke kantor desa, sehingga memperluas cakupan informasi.

Meskipun kebijakan ini sudah cukup efektif, ada beberapa saran untuk meningkatkan kualitas komunikasi dan keterlibatan masyarakat. Pertama, untuk mengatasi tantangan literasi digital di beberapa kalangan masyarakat, disarankan untuk mengadakan pelatihan atau sosialisasi yang lebih intensif terkait penggunaan media sosial atau akses informasi digital. Kedua, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam forum musyawarah desa, dengan menyediakan ruang yang lebih besar untuk diskusi dan masukan terkait program BST. Hal ini dapat memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.

Pemerintah desa juga membuka kanal pengaduan resmi untuk menampung keluhan atau laporan terkait pelaksanaan BST. Kanal ini mencakup layanan langsung di kantor desa, pengaduan melalui telepon, dan formulir pengaduan daring. Sistem pengaduan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti secara cepat dan transparan. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat tetapi juga memberikan ruang bagi evaluasi berkelanjutan atas pelaksanaan program.

Secara keseluruhan, kebijakan Desa Taman Sari dalam menginformasikan program BST menunjukkan komitmen yang kuat terhadap tata kelola yang baik. Dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, melibatkan masyarakat dalam musyawarah, dan menyediakan kanal pengaduan, pemerintah desa berhasil menciptakan lingkungan yang transparan dan partisipatif. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat keberhasilan program BST dalam mengurangi kemiskinan di Desa Taman Sari secara berkelanjutan.

Pemerintah Desa Taman Sari Memberikan Akses Kepada Ketersediaan Dokumen

Pemerintah Desa Taman Sari telah menetapkan kebijakan yang menekankan pada transparansi dalam pendataan dan pengelolaan program Bantuan Sosial Tunai (BST), dengan memberikan akses yang luas kepada masyarakat terhadap ketersediaan dokumen terkait. Salah satu langkah yang diambil adalah penyusunan dan penyebaran dokumen anggaran yang secara rinci mencantumkan alokasi dana, mekanisme penyaluran, dan data penerima manfaat. Melalui kebijakan ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui secara langsung bagaimana dana BST digunakan dan siapa saja yang berhak menerima bantuan, sehingga mendorong terciptanya transparansi yang lebih besar.

Dokumen terkait program BST juga dapat diakses melalui sistem informasi desa yang dikelola oleh perangkat desa. Dalam sistem ini,

masyarakat dapat melihat secara rinci proses pendataan, validasi data penerima manfaat, dan pelaksanaan distribusi bantuan. Melalui pendekatan ini, Pemerintah Desa Taman Sari berupaya untuk memberikan akses yang adil dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat, terlepas dari faktor lokasi geografis atau tingkat literasi informasi. Dengan cara ini, diharapkan tidak ada pihak yang terlewatkan dalam mendapatkan informasi yang relevan dan penting terkait program bantuan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Taman Sari menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai (BST). Langkah-langkah yang diambil, seperti penyediaan dokumen anggaran dan data penerima manfaat yang dapat diakses secara fisik maupun digital, mencerminkan usaha yang serius dalam memastikan seluruh masyarakat memiliki akses yang setara terhadap informasi program. Pemberian akses yang luas ini juga membuktikan bahwa desa ini mengedepankan prinsip keterbukaan dalam pengelolaan dana bantuan sosial.

Pemerintah desa juga memanfaatkan teknologi informasi sebagai saluran komunikasi yang efektif untuk memperluas jangkauan informasi. Melalui penggunaan media sosial resmi seperti Facebook dan WhatsApp, masyarakat yang berada di lokasi terpencil atau yang memiliki keterbatasan fisik dapat tetap mengakses dokumen terkait program BST. Hal ini menunjukkan bahwa desa ini mengadaptasi perkembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam menyebarkan informasi kepada warga desa. Dengan pendekatan ini, transparansi dalam distribusi bantuan dapat lebih terjamin, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Secara keseluruhan, kebijakan transparansi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Taman Sari telah memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan program BST dalam menanggulangi kemiskinan. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, disarankan agar pemerintah desa terus meningkatkan kualitas dan frekuensi sosialisasi, memperhatikan keterbatasan literasi digital, serta terus memperkuat forum-forum partisipasi masyarakat agar seluruh elemen desa dapat terlibat dalam proses pengawasan dan evaluasi program.

Regulasi Yang Menjamin Transparansi

Transparansi dalam pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Taman Sari dijamin melalui berbagai regulasi yang mengatur pengelolaan bantuan sosial di tingkat desa. Salah satu regulasi utama yang mendasari transparansi adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, yang mengamanatkan bahwa desa wajib mengelola dana bantuan sosial dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Regulasi ini mengharuskan setiap pengeluaran dana desa untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui mekanisme yang transparan, baik dalam bentuk laporan anggaran maupun informasi terkait penerima manfaat.

Regulasi terkait sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia juga menjadi dasar penting dalam memastikan keakuratan data penerima manfaat. Proses pendataan yang dilakukan dengan mengacu pada DTKS memungkinkan pemerintah desa untuk memverifikasi dan memvalidasi data secara lebih akurat, sehingga dapat menghindari kesalahan dalam penyaluran bantuan. Penggunaan sistem ini juga mendukung transparansi, karena data penerima manfaat dapat diawasi oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat setempat.

Pentingnya regulasi dalam menjaga transparansi ini juga tercermin dalam peran serta masyarakat dalam pengawasan. Berdasarkan ketentuan yang ada, masyarakat desa memiliki hak untuk meminta klarifikasi atau melaporkan penyimpangan yang ditemukan dalam pelaksanaan program. Untuk itu, Pemerintah Desa Taman Sari telah mengimplementasikan mekanisme pengaduan yang terbuka, di mana setiap warga desa dapat mengajukan pertanyaan atau mengungkapkan keluhan mengenai penggunaan dana BST. Kerangka regulasi yang mendukung pengawasan masyarakat ini memperkuat akuntabilitas dan mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan dana bantuan.

Berdasarkan wawancara peneliti dapat menyimpulkan, regulasi yang diterapkan dalam pengelolaan program Bantuan Sosial Tunai (BST) sudah mencakup prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar utama dalam pendataan penerima manfaat telah memberikan jaminan keakuratan data.

Transparansi dalam hal ini tidak hanya berlaku dalam pengelolaan dana, tetapi juga dalam pendataan penerima manfaat yang menjadi titik awal dari keberhasilan program tersebut. meskipun regulasi yang ada sudah memadai, tantangan terkait literasi digital dan pemahaman masyarakat tentang mekanisme pendataan perlu diperhatikan. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah desa memperkuat sosialisasi mengenai penggunaan DTKS dan pentingnya data yang valid melalui berbagai saluran, baik fisik maupun digital. Penyuluhan yang lebih intensif kepada masyarakat tentang peran serta mereka dalam proses verifikasi

data akan memperkuat pengawasan internal dan eksternal terhadap program BST.

Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi program BST sangat bergantung pada keberlanjutan regulasi yang mengatur transparansi dalam pendataan dan penyaluran bantuan sosial. Oleh karena itu, disarankan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga terkait dalam memastikan bahwa setiap tahapan program BST berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Hal ini akan memperkecil potensi ketidaksesuaian data dan memastikan program bantuan sosial ini benar-benar tepat sasaran, serta dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pemerintah Desa Taman Sari Telah Memiliki Kerangka Regulasi Terkait Transparansi Anggaran

Pemerintah Desa Taman Sari memiliki komitmen yang kuat terhadap transparansi anggaran, terutama dalam konteks pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai (BST). Salah satu regulasi yang mendasari prinsip transparansi anggaran di desa ini adalah Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa, termasuk alokasi dana untuk program BST. Perdes ini menetapkan bahwa setiap alokasi anggaran harus dicatat dengan jelas, dilaporkan secara terbuka, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya peraturan ini, pengelolaan dana bantuan sosial diharapkan dapat dilakukan dengan prinsip akuntabilitas yang tinggi.

Sebagai bagian dari upaya transparansi anggaran, Pemerintah Desa Taman Sari memastikan bahwa anggaran untuk program BST disusun dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan. Musyawarah Desa (Musdes) merupakan forum yang digunakan untuk merumuskan prioritas anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui forum ini, masyarakat dapat memberikan masukan dan memastikan bahwa alokasi dana BST tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Hal ini juga memastikan bahwa anggaran tidak disalahgunakan dan selalu digunakan untuk kepentingan yang benar-benar membutuhkan.

Regulasi yang mengatur transparansi anggaran juga mencakup pengawasan internal dan eksternal. Pemerintah Desa Taman Sari melakukan audit keuangan secara rutin untuk memastikan bahwa seluruh pengeluaran dana sesuai dengan peruntukannya dan tidak ada kebocoran anggaran. Selain itu, masyarakat diberi hak untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana melalui saluran pengaduan yang telah disediakan. Sistem pengawasan ini dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap program BST, serta

memastikan bahwa setiap tahap pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah desa telah menetapkan regulasi yang jelas dan terstruktur untuk memastikan transparansi anggaran dalam pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai (BST). Regulasi ini mengacu pada Peraturan Desa (Perdes) yang mewajibkan pencatatan dan pelaporan anggaran secara terbuka. Proses penyusunan anggaran melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui Musyawarah Desa (Musdes), yang menjadi dasar dalam alokasi dana BST yang sesuai dengan kebutuhan.

Laporan anggaran disebarkan kepada masyarakat melalui papan informasi dan media sosial desa, yang memberikan akses mudah bagi masyarakat untuk memantau pengelolaan dana. Pengawasan internal dan audit keuangan yang dilakukan secara berkala memastikan bahwa seluruh penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan yang ada.

Meskipun regulasi yang ada sudah baik dalam mendukung transparansi anggaran, terdapat beberapa saran yang dapat memperkuat pelaksanaan program BST di masa mendatang. Pertama, perlu ada peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya transparansi anggaran dan mekanisme pengelolaannya. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan atau pelatihan terkait peran serta masyarakat dalam memantau penggunaan anggaran. Kedua, meskipun laporan anggaran telah disebarkan melalui media sosial, disarankan untuk menggunakan lebih banyak saluran komunikasi, seperti forum diskusi langsung atau webinar, untuk menjangkau lebih banyak warga desa, terutama mereka yang kurang aktif di media sosial. Disarankan untuk memperkuat sistem pengaduan dan pelaporan jika ada indikasi penyalahgunaan anggaran, serta memberikan tindak lanjut yang jelas terhadap laporan tersebut untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana bantuan sosial.

Dengan implementasi yang lebih baik terhadap saran-saran tersebut, diharapkan pengelolaan anggaran untuk program BST di Desa Taman Sari dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Regulasi Yang Menjamin Transparansi Proses Pelaksanaan Pemberian BST

Dalam rangka memastikan transparansi dalam pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai (BST), Pemerintah Desa Taman Sari mengacu pada berbagai regulasi yang mengatur proses pendataan, pengelolaan anggaran, serta penyaluran bantuan sosial. Salah satu regulasi

utama yang mendasari proses ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan dasar hukum bagi pengelolaan anggaran desa dan kewajiban untuk mengedepankan transparansi dalam penggunaan dana desa. Pemerintah desa juga merujuk pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengatur tata kelola dana desa dan mekanisme pelaporan kepada masyarakat.

Selain itu, regulasi yang tidak kalah penting adalah Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa, termasuk dalam hal pendataan penerima manfaat BST. Dalam Perdes ini, terdapat ketentuan yang mewajibkan Pemerintah Desa Taman Sari untuk menyusun anggaran secara terbuka dan mendetail. Anggaran yang disusun harus mencakup rencana penggunaan dana untuk program BST yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Masyarakat diberikan hak untuk mengakses rincian anggaran melalui musyawarah desa (Musdes) dan papan informasi desa, yang memastikan bahwa proses pelaksanaan BST dilakukan secara transparan.

Proses pendataan penerima manfaat BST juga diatur dalam regulasi terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. DTKS digunakan sebagai referensi utama untuk mendata keluarga miskin yang berhak menerima bantuan. Penggunaan data yang telah diverifikasi dan divalidasi ini memberikan jaminan bahwa hanya masyarakat yang memenuhi kriteria yang akan tercatat sebagai penerima manfaat. Regulasi ini juga memastikan bahwa proses verifikasi data dilakukan secara akurat dan objektif, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program BST.

Selain dari segi pendataan, regulasi juga mengatur tentang mekanisme penyaluran bantuan sosial. Program BST di Desa Taman Sari dilaksanakan dengan prosedur yang jelas dan terbuka, mulai dari tahap pencairan dana hingga distribusi bantuan. Pemerintah desa mengacu pada pedoman yang ada untuk memastikan bahwa dana bantuan sosial disalurkan tepat waktu dan kepada penerima yang berhak. Seluruh proses penyaluran bantuan ini diawasi secara ketat oleh perangkat desa, dengan dukungan dari aparat keamanan dan pengawasan masyarakat, guna menghindari adanya penyelewengan atau ketidaksesuaian dalam proses distribusi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan, dalam proses penyaluran bantuan sosial berjalan dengan sangat transparan dan terorganisir dengan baik. Penerima bantuan merasa yakin dengan proses pendataan yang dilakukan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

(DTKS) yang sudah diverifikasi dan divalidasi. Selain itu, perangkat desa memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai anggaran, mekanisme penyaluran, serta status pencairan bantuan melalui papan informasi desa dan media sosial. Masyarakat juga diberikan akses untuk mengawasi jalannya program melalui pengawasan internal dan eksternal yang melibatkan aparat desa serta masyarakat itu sendiri. Sistem pelaporan dan pengaduan yang tersedia memberikan rasa aman kepada masyarakat, memastikan bahwa setiap ketidakberesan dapat segera dilaporkan dan ditindaklanjuti.

Meskipun pelaksanaan program BST di Desa Taman Sari sudah cukup baik, terdapat beberapa saran yang dapat meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas. Pertama, perlu ada penguatan sistem sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai peran serta mereka dalam pengawasan dan pelaporan program BST. Peningkatan pemahaman tentang prosedur yang benar dapat meminimalisir kesalahpahaman dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Kedua, meskipun media sosial digunakan untuk menyebarkan informasi, disarankan untuk memperluas penggunaan teknologi informasi lainnya, seperti aplikasi khusus desa atau platform digital berbasis web, yang dapat memberikan akses lebih mudah kepada masyarakat di daerah terpencil. Ketiga, penting untuk terus meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam hal audit dan pelaporan keuangan agar dapat lebih efisien dalam mendeteksi dan mengatasi potensi penyalahgunaan dana bantuan.

Dengan implementasi saran-saran tersebut, diharapkan kualitas program BST di Desa Taman Sari dapat semakin ditingkatkan, yang pada gilirannya akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi kesejahteraan warga desa.

Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu agenda utama di Desa Taman Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah desa berfokus pada program-program yang menjawab kebutuhan masyarakat miskin, salah satunya melalui Bantuan Sosial Tunai (BST). Dalam pelaksanaan program ini, pemerintah desa menekankan pentingnya transparansi pendataan dan penyaluran bantuan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Proses ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk perangkat desa, tokoh masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan, guna menjamin keakuratan data dan keadilan distribusi bantuan.

Langkah pertama yang diambil Desa Taman Sari adalah mengidentifikasi masyarakat yang berhak menerima bantuan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data ini diverifikasi dan divalidasi melalui survei lapangan, yang dilakukan secara langsung oleh tim pendataan desa. Proses ini melibatkan musyawarah desa (musdes) sebagai forum untuk memastikan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam menentukan penerima manfaat. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, pemerintah desa berupaya mencegah adanya bias atau manipulasi data dalam proses pendataan.

Selain pendataan, Desa Taman Sari juga memastikan penyaluran BST dilakukan secara terbuka. Informasi terkait kriteria penerima manfaat, jumlah bantuan, serta jadwal penyaluran disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti papan informasi desa, media sosial resmi, dan musyawarah warga. Upaya ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat tentang mekanisme penyaluran bantuan. Transparansi ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau melaporkan jika terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program.

Langkah-langkah yang diambil Desa Taman Sari menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penanggulangan kemiskinan berbasis transparansi dan pemberdayaan masyarakat. Meski demikian, tantangan seperti keterbatasan anggaran, akses informasi yang belum merata, dan potensi ketidaktepatan data masih menjadi perhatian. Untuk itu, pemerintah desa perlu terus meningkatkan kualitas pendataan, memperluas akses informasi, dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga lain. Dengan strategi ini, diharapkan Desa Taman Sari dapat mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah Desa Taman Sari memiliki pendekatan strategis dalam proses penanggulangan kemiskinan, yaitu dengan mendasarkan program pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai langkah awal. Namun, untuk memastikan keakuratan data, pemerintah desa melakukan verifikasi dan validasi ulang melalui survei lapangan serta musyawarah desa (musdes). Pendekatan ini mencerminkan komitmen pemerintah desa untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Transparansi dalam pendataan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program bantuan. Adapun yang harus dilakukan oleh pemerintah desa taman sari yaitu :

1. Peningkatan Kapasitas Data: Pemerintah desa disarankan untuk terus memperbarui dan meningkatkan kualitas DTKS dengan melibatkan teknologi digital dalam proses verifikasi dan validasi. Sistem digital yang terintegrasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi data.
2. Edukasi Masyarakat: Desa perlu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya data yang akurat, sehingga warga terdorong untuk melaporkan informasi yang benar mengenai kondisi mereka. Hal ini juga dapat meningkatkan partisipasi warga dalam musyawarah desa.
3. Penguatan Sistem Pengawasan: Dibutuhkan mekanisme pengawasan yang lebih terstruktur untuk memantau proses verifikasi dan validasi, misalnya dengan membentuk tim independen atau melibatkan pihak ketiga untuk memastikan akuntabilitas.
4. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Pemerintah desa dapat menjalin kerja sama dengan lembaga non-pemerintah atau perguruan tinggi dalam melakukan survei lapangan untuk mendapatkan data yang lebih objektif dan mendalam.
5. Evaluasi Berkala: Proses verifikasi dan validasi ulang yang dilakukan perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa data penerima manfaat tetap relevan dan sesuai dengan kondisi terkini. Hal ini penting untuk menghindari adanya penerima yang tidak memenuhi kriteria atau adanya keluarga miskin yang tidak terdaftar.

Dengan adanya keterbukaan dalam setiap tahapan pendataan dan pelaksanaan BST, Desa Taman Sari berhasil membangun sistem yang lebih transparan dan inklusif. Untuk memperkuat keterbukaan ini, diperlukan peningkatan dalam penggunaan teknologi informasi yang dapat mendukung proses pendataan dan pengawasan secara lebih efisien. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program, sekaligus memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar mencapai tujuan utamanya, yaitu mengurangi kemiskinan di tingkat masyarakat desa.

Transparan Dalam Menjalankan Pemberian BST

Transparansi dalam menjalankan program Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan komponen penting dalam memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang berhak. Di Desa Taman Sari, transparansi diwujudkan melalui pengelolaan data yang akurat dan proses pelaksanaan yang terbuka. Data calon penerima bantuan disusun berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kemudian diverifikasi ulang melalui musyawarah desa (musdes) dan survei lapangan untuk memastikan keabsahannya. Proses ini dirancang

agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pemerintah Desa Taman Sari juga memastikan bahwa mekanisme pelaksanaan BST diketahui oleh masyarakat luas. Informasi mengenai kriteria penerima, jadwal penyaluran, dan prosedur pengambilan bantuan disampaikan secara terbuka melalui papan informasi desa, media sosial resmi, serta pertemuan desa. Langkah ini tidak hanya memberikan pemahaman kepada masyarakat tetapi juga mencegah kesalahpahaman yang dapat menyebabkan konflik. Selain itu, transparansi dalam informasi ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Selain keterbukaan informasi, Desa Taman Sari juga menekankan pengawasan dalam proses pemberian BST. Setiap tahapan, mulai dari penetapan penerima manfaat hingga distribusi dana, diawasi oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan regulasi. Masyarakat juga diberikan ruang untuk menyampaikan pengaduan jika terjadi pelanggaran, seperti ketidaksesuaian data penerima atau penyalahgunaan dana. Sistem pengawasan ini memberikan jaminan bahwa program BST berjalan secara akuntabel.

Audit keuangan rutin yang dilakukan oleh pemerintah desa merupakan bentuk lain dari transparansi dalam pelaksanaan BST. Audit ini tidak hanya memastikan bahwa alokasi dana telah digunakan sesuai tujuan, tetapi juga memberikan kepastian hukum jika ditemukan adanya penyimpangan. Dengan adanya mekanisme audit yang terstruktur, Desa Taman Sari mampu menciptakan sistem pengelolaan bantuan sosial yang lebih baik dan berkelanjutan.

Keberhasilan Desa Taman Sari dalam menjalankan BST secara transparan dapat menjadi contoh bagi desa lain dalam mengelola bantuan sosial. Namun, untuk meningkatkan efektivitas program, pemerintah desa perlu memanfaatkan teknologi digital secara lebih luas, seperti penggunaan aplikasi berbasis data untuk pengelolaan dan pemantauan bantuan. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses pendataan, meningkatkan efisiensi pengawasan, dan mencegah terjadinya kesalahan atau penyimpangan di masa depan. Dengan demikian, transparansi dalam pemberian BST dapat terus terjaga dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat miskin.

Pemberian BST Disembunyikan Atau Tidak Disosialisasikan

Kurangnya sosialisasi dalam pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Di Desa Taman Sari, transparansi dan keterbukaan informasi

menjadi aspek penting untuk memastikan keadilan dan efektivitas program BST. Jika pemberian bantuan dilakukan tanpa sosialisasi yang memadai, maka masyarakat tidak mendapatkan pemahaman yang jelas terkait mekanisme program, kriteria penerima manfaat, maupun prosedur pendistribusian. Hal ini dapat memicu kesalahpahaman, ketidakpuasan, hingga ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa.

Tanpa sosialisasi yang baik, proses pendataan juga berpotensi tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara optimal. Ketika masyarakat tidak mengetahui bahwa pendataan sedang berlangsung, mereka tidak memiliki kesempatan untuk memastikan bahwa data yang diambil sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, di mana bantuan diberikan kepada individu atau keluarga yang tidak memenuhi kriteria, sementara masyarakat miskin yang seharusnya menerima bantuan justru terlewatkan.

Oleh karena itu, sosialisasi yang baik harus menjadi bagian integral dari pelaksanaan BST. Pemerintah Desa Taman Sari perlu memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, seperti musyawarah desa, papan informasi, dan media sosial, untuk menyampaikan informasi terkait program kepada masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif melalui sosialisasi, pemerintah dapat memastikan bahwa program BST berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan utama, yaitu mengurangi tingkat kemiskinan di desa. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi kelompok yang membutuhkan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti menyimpulkan, pemerintah Desa Taman Sari menunjukkan komitmen tinggi dalam memastikan transparansi dalam proses pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST). Hal ini tercermin dari upaya mereka melakukan sosialisasi melalui berbagai saluran komunikasi, seperti musyawarah desa, papan pengumuman, dan media sosial resmi desa. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi mengenai program BST dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Namun, terdapat kendala yang signifikan, terutama dalam menjangkau masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan masyarakat yang kurang memahami teknologi. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya sosialisasi yang dilakukan belum sepenuhnya inklusif dan membutuhkan strategi tambahan untuk menjangkau kelompok yang sulit diakses.

Menghubungkan Antara Pelaksana Dan Penerima Bantuan

Transparansi dalam menghubungkan pelaksana dan penerima bantuan menjadi elemen kunci dalam keberhasilan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Taman Sari. Hubungan yang terjalin dengan baik antara pemerintah desa sebagai pelaksana program dan masyarakat sebagai penerima manfaat mencerminkan akuntabilitas serta komitmen untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Melalui musyawarah desa (musdes), pemerintah desa mengidentifikasi calon penerima manfaat dan mendengarkan masukan masyarakat untuk meminimalkan potensi kesalahan dalam pendataan. Musyawarah ini tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga mendorong partisipasi aktif warga dalam memastikan keadilan distribusi.

Selain musyawarah desa, pemerintah Desa Taman Sari memanfaatkan teknologi informasi untuk menjembatani komunikasi antara pelaksana dan penerima bantuan. Media sosial resmi desa digunakan untuk menyampaikan informasi terkait kriteria penerima, mekanisme pendaftaran, hingga jadwal pencairan BST. Dengan pendekatan ini, informasi dapat disampaikan secara luas dan cepat, bahkan menjangkau masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil. Proses ini mencerminkan upaya pemerintah desa dalam menerapkan prinsip keterbukaan dan memberikan akses yang setara kepada seluruh masyarakat (Pratama, Hadi, et al., 2025).

Dalam pelaksanaan penyaluran BST, keberadaan perangkat desa yang berperan sebagai penghubung langsung antara pelaksana dan penerima bantuan menjadi sangat penting. Perangkat desa bertanggung jawab untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat, baik dalam pengisian data maupun dalam proses pencairan bantuan. Mereka juga menjadi pihak yang menerima aduan apabila terjadi kendala atau ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan. Mekanisme ini memastikan bahwa penerima manfaat memiliki saluran komunikasi yang jelas untuk menyampaikan keluhan atau masukan terkait program.

Keberadaan audit keuangan tahunan menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga hubungan yang sehat antara pelaksana dan penerima bantuan. Audit ini memberikan jaminan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. Dengan demikian, masyarakat memiliki kepercayaan lebih tinggi terhadap pemerintah desa, sementara pelaksana program juga terlindungi dari tuduhan yang tidak berdasar. Transparansi laporan keuangan ini juga meminimalkan potensi konflik yang dapat timbul akibat ketidakpuasan masyarakat.

Penerima Memenuhi Persyaratan Dalam Penerimaan Bantuan Sosial Tunai

Transparansi dalam pendataan penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Taman Sari menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Salah satu kunci dalam hal ini adalah memastikan bahwa penerima manfaat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Proses seleksi penerima bantuan dimulai dengan pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang merupakan acuan utama dalam menentukan keluarga miskin yang berhak menerima bantuan. DTKS sendiri merupakan data yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang memuat informasi tentang keluarga miskin yang membutuhkan bantuan sosial (Pratama et al., 2023).

Pemerintah Desa Taman Sari tidak hanya mengandalkan data dari DTKS semata. Untuk menjamin bahwa penerima bantuan sesuai dengan kondisi di lapangan, dilakukan verifikasi dan validasi data secara menyeluruh. Proses ini mencakup survei lapangan yang dilakukan oleh tim desa, serta musyawarah desa yang melibatkan perangkat desa dan masyarakat setempat. Dengan cara ini, data yang telah ada di DTKS diperbarui dan disesuaikan dengan kondisi terkini, sehingga penerima bantuan benar-benar merupakan keluarga yang paling membutuhkan.

Penerima bantuan juga diwajibkan untuk memenuhi beberapa persyaratan administratif, seperti kepemilikan kartu keluarga (KK) yang sah, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. Pemerintah desa, melalui perangkat desa, membantu masyarakat dalam memenuhi persyaratan ini, dengan memberikan pendampingan untuk mengisi formulir dan menyiapkan dokumen yang diperlukan. Dengan adanya sistem yang jelas dan prosedural ini, masyarakat merasa lebih mudah dan transparan dalam proses pendaftaran dan seleksi penerima bantuan.

Penting untuk dicatat bahwa mekanisme untuk memastikan penerima bantuan memenuhi persyaratan tidak berhenti pada saat pendataan awal. Pemerintah Desa Taman Sari berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan pembaruan data secara berkala, untuk memastikan bahwa penerima bantuan tetap memenuhi kriteria yang ada. Proses ini bertujuan agar bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan tidak ada masyarakat yang terlewatkan atau yang tidak lagi berhak menerima bantuan. Selain itu, pemerintah desa juga membuka saluran bagi masyarakat untuk melaporkan jika ada penerima yang tidak memenuhi persyaratan, sehingga pengawasan dalam pelaksanaan program dapat terjaga dengan baik.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Taman Sari menunjukkan pencapaian yang positif dalam hal transparansi dan partisipasi masyarakat. Pemerintah desa telah berhasil memastikan bahwa informasi mengenai penggunaan anggaran dan distribusi bantuan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. Proses musyawarah desa juga memberikan ruang bagi warga untuk terlibat langsung dalam perencanaan dan evaluasi program. Pemanfaatan teknologi informasi turut memperlancar distribusi informasi tentang program BST kepada masyarakat. Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Taman Sari telah dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Proses pendataan dilakukan secara cermat melalui basis DTKS, dilengkapi dengan musyawarah desa yang melibatkan berbagai pihak untuk memastikan keadilan distribusi. Partisipasi masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan program ini.

Daftar Pustaka

- Iping, B. (2020). Perlindungan sosial melalui kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan perspektif ekonomi dan sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 516-526.
- Nurahmawati, F., & Hartini, S. (2020). Implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT) terhadap warga terdampak Covid-19 di desa Cibadak. *PKM-P*, 4(2), 160-165.
- Paat, R., Pangemanan, S., & Singkoh, F. (2021). Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Pratama, I. N., Hadi, A., & Sutarna, I. T. (2025). Socio-Economic Reintegration of Former Migrant Workers in Indonesia : Sustainable Livelihoods and Socio-Cultural Models. *Journal of Governance and Local Politics*, 7(2), 304-312.
- Pratama, I. N., Ibrahim, A. H., & Akbar, P. (2023). Pentahelix Collaboration Concept as an Effort to Accelerate Poverty Reduction in the Covid-19 Situation in the City of Mataram. *Jurnal Public Policy*, 9(1). <https://doi.org/10.35308/jpp.v9i1.6439>

- Pratama, I. N., Iman, S., Afriansyah, I., & Mataram, U. M. (2025). *SUSTAINABLE POVERTY ALLEVIATION DALAM MEWUJUDKAN*. 4307(1), 155-161.
- Purnawan, H., Triyanto, D., & Thareq, S. I. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang. *PERSPEKTIF*, 11(2), 407-416.
- Sofi, I. (2021). Efektivitas bantuan langsung tunai dana desa dalam pemulihan ekonomi di desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(3), 247-262.